



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

AREA II PENATAAN TATA LAKSANA



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan

2023



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

AREA II PENATAAN TATA LAKSANA

PENERAPAN SOP

DAFTAR ISI

1. Penerapan SOP *Focus Group Discussion* (FGD)
2. Penerapan SOP Layanan Referensi Hukum dan Konstitusi
3. Penerapan SOP Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi
4. Penerapan SOP Narasumber Kunjungan
5. Penerapan SOP Pelaporan Karya Tulis Ilmiah

	NOMOR SOP	49/SOP/2500/01/2022
	TGL. PEMBUATAN	18 Oktober 2019
	TGL. REVISI	16 Agustus 2021
	TGL. EFEKTIF	03 Januari 2022
<p>KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BIDANG PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA</p>	NAMA SOP	SOP Focus Group Discussion (FGD)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2. Peraturan Sekretaris Jenderal MK No. 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekjen MK No. 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan 4. Petunjuk Operasional Kegiatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 5. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2. Mampu mengoperasikan komputer dan kelengkapannya 3. Memiliki kemampuan bekerja dalam suatu kepanitiaan 4. Memiliki kemampuan di bidang hukum.



<p>Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh</p> <p>9. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan Penelitian Kerjasama 2. SOP Penyusunan Kajian Perkara Pendalaman 3. SOP Penyusunan Kajian Perkara Komprehensif 4. SOP Penyusunan Pendapat Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan kelengkapannya 2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik, maka dukungan substantif terhadap hakim terkait isu hukum strategis menjadi berkurang</p>	<p>Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual</p>



6.	Memeriksa Surat Undangan dan Materi FGD	
----	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

7.	Mengirimkan dan Mengkonfirmasi Undangan dan Materi FGD	
----	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

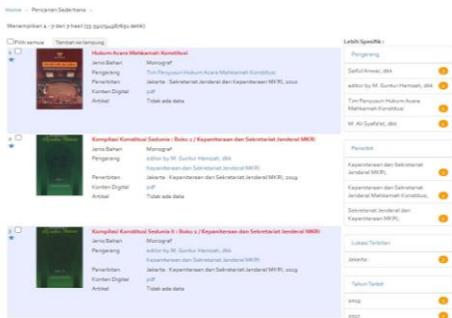
8.	Melaksanakan FGD	
----	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

9.	Melaporkan pelaksanaan FGD	
----	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

10.	Memberikan catatan terkait FGD administrasi draft TOR, Nota	
-----	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	NOMOR SOP	12/SOP/2500/01/2022
	TGL. PEMBUATAN	18 September 2020
	TGL. REVISI	10 Desember 2021
	TGL. EFEKTIF	03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BIDANG PERPUSTAKAAN DAN SEJARAH KONSTITUSI	NAMA SOP	Layanan Referensi Hukum dan Konstitusi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan referensi hukum dan konstitusi 2. Pelaksana memiliki kemampuan menelusuri informasi hukum dan konstitusi 3. Pelaksana memiliki kemampuan menyediakan referensi hukum dan konstitusi
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengembangan Bahan Pustaka		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Kelengkapannya. 2. Koleksi buku hukum dan konstitusi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka akan menghambat penyelesaian		Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.



	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Menerima daftar kebutuhan referensi pemustaka	
2.	Menelusuri bahan referensi melalui katalog buku dalam aplikasi sistem perpustakaan	
3.	Memeriksa dan menganalisis referensi yang dibutuhkan pemustaka	
4.	Menerima hasil analisa bahan referensi dan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan	
5.	Mencatat bahan referensi yang tersedia di perpustakaan ke dalam aplikasi perpustakaan inisilite	

6. Mengumpulan data sirkulasi perbulan hasil layanan referensi

NO	Peminjam (ID - Nama)	Judul Buku	Tanggal Peminjaman	Tanggal Harus Kembali
1	4, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH	Interpreting Constitutions Theories, Principles And Institutions	25/11/2008	02/12/2008
2	130000307, Yuanna Sitilla, S. Sos	English in Context: Popular Sayings - 01571	25/11/2008	02/12/2008
3	197904072006042006, Niken Rahardina, S.I.P.	Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model A	26/11/2008	03/12/2008
4	4, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH	Constitutional Theory	15/12/2008	22/12/2008
5	4, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH	Kompilasi Konstitusi Sedunia / 6039	18/12/2008	25/12/2008
6	197810162006041003, Widi Amoko, S.H.	Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi 02940	18/12/2008	25/12/2008

7. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelesaian layanan referensi perbulan kepada Kapusitka

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENGADAAN BUKU DAN BAHAN HUKUM KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Unit Eselon I : Kapangeran dan Sekretaris Jendral MKRI
 Unit Eselon II : Pusat Penelitian, Pengajian Perkaru dan Penyelidikan Penyelidikan Perkaru Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
 Saranan Program : Transliterasi pemangangan perkaru konstitusi yang bermutu
 Indikator Kinerja Program : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkaru Konstitusi
 2. Penentase Jumlah Perkaru PKU, SKLN, dan Perkaru Lainnya yang diputus
 3. Jumlah Waktu Penyelesaian Perkaru PKU, SKLN, dan Perkaru Lainnya
 4. Penentase Jumlah Perkaru PKU Legaldaf, PKU Presiden, dan Wakil Presiden, PMP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus
 5. Penentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkaru PKU Legaldaf, PKU Presiden dan Wakil Presiden, PMP Gubernur, Bupati dan Walikota
 Baurat dengan UU :
 Kegiatan :
 Saranan Kegiatan :
 Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengadaan Perkaru Konstitusi
 2. Penentase Jumlah Perkaru PKU, SKLN, dan Perkaru Lainnya yang diputus
 3. Jumlah Waktu Penyelesaian Perkaru PKU, SKLN, dan Perkaru Lainnya
 4. Penentase Jumlah Perkaru PKU Legaldaf, PKU Presiden dan Wakil Presiden, PMP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus
 5. Penentase ketepatan Waktu Penyelesaian

8. Mencatat referensi yang belum tersedia perpuustakaan, sebagai acuan kegalan pengadaan bahan pustaka

No	Title	Subtitle	Publication date	Author/Editor	Imprint	Print ISBN	Price List Book	EISBN
1	Maritime Disputes in Northeast Asia	Regional Challenges and Cooperation	13-Apr-2017	Kim	Brill Nijhoff	9789004344211	3.400.000	9789004344228
2	Marx and Social Justice	Ethics and Natural Law in the Critique of Political Economy	16-Nov-2017	McCarthy	BRILL	9789004311954	3.775.000	9789004311961
3	Marxism and Criminology	A History of Criminal Sociology	02-Mar-2017	Vegh Weiss	BRILL	9789004319554	3.025.000	9789004319561
4	Mediation in Contemporary Chinese Civil Justice	A Proceduralist Diachronic Perspective	03-Aug-2017	Chan	Brill Nijhoff	9789004342395	3.075.000	9789004342392
5	Migration on the Move	Essays on the Dynamics of Migration	03-Aug-2017	Gritters	Brill Nijhoff	9789004330450	3.950.000	9789004330467
6	Minor Marriage in Early Islamic Law		21-Jun-2017	Baugh	BRILL	9789004344839	2.950.000	9789004344880
7	Mobilizing Public Sociology	Scholars, Activists, and Latin@ Migrants' Converses on Community Organizing	25-May-2017	Carty	BRILL	9789004221063	2.850.000	9789004338234
8	National Styles in Science, Diplomacy, and Science	A Case Study of the United Nations Security Council P5 Countries' Development Alternative	06-Dec-2016	Krisnyak	BRILL	9789004394436	2.125.000	9789004394445

9. Menerima dan mereview laporan layanan referensi dan Pustakawan untuk diteruskan ke Kapuslitka melalui SIKD

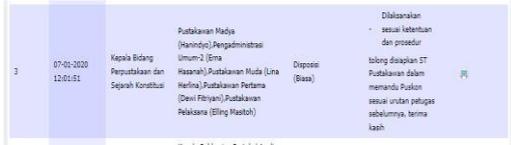
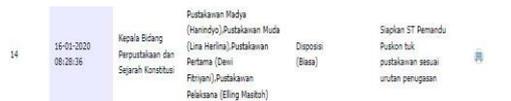
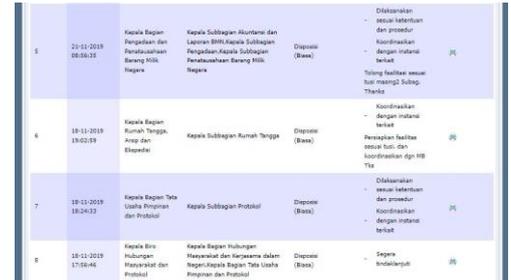
☆	Sudah Dibaca	277/2500/PT.04/08/2021	Kepala Subbidang Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengajian Perkaru dan Penyelidikan Perpuustakaan	Pemohonan Izin Pelaksanaan Peluncuran dan Belah Buku Tahun 2021	2021-08-06	2021-09-02 13:03:48	-
☆	Sudah Dibaca	132/PT.03/04/2021	Putakawan Pelaksana (Eling Hastika)	Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan Pengembangan Perpuustakaan S. Pustan	2021-04-07	2021-08-31 09:50:20	-
☆	Sudah Dibaca	132/PT.03/04/2021	Putakawan Pelaksana (Eling Hastika)	Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan Pengembangan Perpuustakaan S. Pustan	2021-04-07	2021-08-31 08:56:14	-
☆	Sudah Dibaca	296/2500/PT.04/08/2021	Putakawan Perkaru (Dewi Fitriyani)	Usulan pekerjaan penyempulan buku perpuustakaan	2021-08-19	2021-08-30 08:43:35	-
☆	Sudah Dibaca	296/2500/PT.04/08/2021	Putakawan Perkaru (Dewi Fitriyani)	Usulan pekerjaan penyempulan buku perpuustakaan	2021-08-19	2021-08-30 07:25:30	-

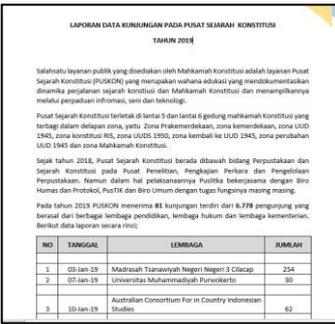
10. Menerima dan mereview laporan hasil pekerjaan layanan



	NOMOR SOP	9/SOP/2500/01/2022
	TGL. PEMBUATAN	18 September 2020
	TGL. REVISI	10 Desember 2021
	TGL. EFEKTIF	03 Januari 2022
<p>KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BIDANG PERPUSTAKAAN DAN SEJARAH KONSTITUSI</p>	NAMA SOP	Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum 3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No 13 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana menguasai materi tentang sejarah konstitusi di Indonesia 2. Pelaksana memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan materi 3. Pelaksana memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik dalam melayani
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengembangan Konten Pusat Sejarah Konstitusi 2. SOP Pemeliharaan Pusat Sejarah Konstitusi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Kelengkapannya. 2. Media/Alat penyaji informasi



	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Menerima disposisi Sekretaris Jenderal melalui SIKD	
2.	Memerintahkan Kabid Perpustakaan menerima kunjungan	
3.	Melakukan koordinasi dengan Pustakawan dalam menyiapkan layanan kunjungan	
4.	Melakukan koordinasi dengan Biro Umum terkait kesiapan sarana prasarana	
5.	Melakukan koordinasi dengan Kabag Protokol terkait kesiapan penerimaan kunjungan	

6.	Membuat surat tugas untuk pemandu layanan kunjungan	 <p>The screenshot shows a web interface for 'Detail Naskah'. It includes navigation buttons like 'Kembali', 'Teruskan', 'Nota Dinas', 'Ubah Metadata', and 'Grafik'. Below these are tabs for 'Tindakan Masuk', 'Histori Naskah', 'Metadata', and 'Status Pemberkasan'. A search bar is present. The main content is a table with columns: No, Tanggal & Jam, Asal Naskah, Tujuan Naskah, Keterangan, and Pesan. One entry is visible with details about a document from 20-01-2020.</p>																
7.	Mempersiapkan dan mengecek sistem dan peralatan di Pusat Sejarah Konstitusi	 <p>The image shows a man in a white shirt and tie sitting at a desk, looking at a computer monitor. He is in a room with bookshelves in the background, likely a library or office.</p>																
8.	Memberikan layanan kungkungan di Pusat Sejarah Konstitusi	 <p>The image shows a group of people, including men and women, gathered around a display case in a museum or gallery. They are looking at the exhibits on display.</p>																
9.	Mendampingi pustakawan dalam memberikan layanan kunjungan	 <p>The image shows a group of people standing in a room, possibly a library or office. Some individuals are holding bags, and they appear to be engaged in a conversation or activity.</p>																
10.	Menyampaikan laporan penyelesaian penugasan kepada Kapuslitka	 <p>The image shows a document titled 'LAPORAN DATA KUNJUNGAN PADA PUSAT SEJARAH KONSTITUSI TAHUN 2018'. The document contains text describing the services provided and a table with columns: NO, TANGGAL, LEMBAGA, and JUMLAH. The table lists three entries for visits in January 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TANGGAL</th> <th>LEMBAGA</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>03-Jan-18</td> <td>Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Cilacap</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>07-Jan-18</td> <td>Universitas Muhammadiyah Purwokerto</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10-Jan-18</td> <td>Australian Consortium For in Country Indonesian Studies</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TANGGAL	LEMBAGA	JUMLAH	1	03-Jan-18	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Cilacap	254	2	07-Jan-18	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	30	3	10-Jan-18	Australian Consortium For in Country Indonesian Studies	62
NO	TANGGAL	LEMBAGA	JUMLAH															
1	03-Jan-18	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Cilacap	254															
2	07-Jan-18	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	30															
3	10-Jan-18	Australian Consortium For in Country Indonesian Studies	62															

11. Menerima dan mencatat laporan kunjungan sebagai bahan laporan tahunan

NO	TANGGAL KUNJUNGAN	INSTANSI	JUMLAH
1	09-Jan-20	ACICS (Australian Consortium for in Country Indonesian Studies)	55
2	10-Feb-20	SMA Negeri 1 Padang	38
3	13-Jan-20	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	100
4	20-Jan-20	Universitas Muhammadiyah Surabaya	60
5	24-Jan-20	Universitas Pelita Harapan	40
6	27-Jan-20	STKIP Pilih Tulungagung	19
7	06-Feb-20	Universitas Surabaya	150
8	29-Jan-20	PSKH UIN Sunan Kalijaga	50
9	21-Jan-20	Universitas Muhammadiyah Magelang	124
10	30-Jan-20	STKIP Pilih Surabaya	90
11	03-Feb-20	Universitas Islam Nusantara	100
12	23-Jan-20	Sekolah alam Indonesia Tangerang	43
13	23-Jan-20	MTs Negeri 3 Cilegon	244
14	10-Feb-20	Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya	20
15	04-Mar-20	SMA Lentera Harapan Curing	60
16	05-Feb-20	Universitas Udayana	60
17	11-Feb-20	Universitas Muslim Makassar	10
18	11-Feb-20	UIN Raden Inan Lampung	71
19	14-Feb-20	President University	30
20	19-Feb-20	Universitas Yarsi	60
21	20-Feb-20	Universitas Semarang	50
22	25-Feb-20	Universitas Mahayanti	50
23	28-Feb-20	Universitas Islam Jember	30
24	04-Mar-20	UINda Sragajenanta	125
25	09-Mar-20	Ipsika Sekolah Kristen	128
26	03-Mar-20	SMA N 84 Jakarta	41
27	05-Mar-20	UIN Raden Inan Lampung	200
28	10-Mar-20	Universitas Pendidikan Ganesha	155

12. Mereview dan meneruskan laporan penyelesaian layanan kunjungan



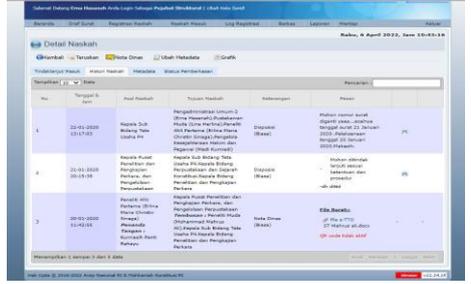
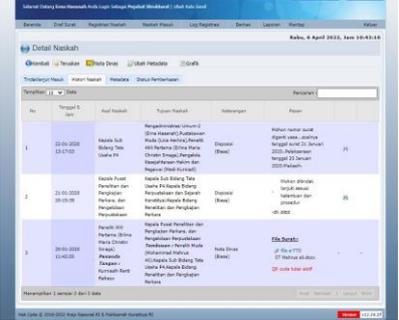
13. Menerima laporan penyelesaian kunjungan dan ditembuskan kepada Sekjen

9	27-02-2019 12:36:17	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pembinaan & Panitera/Kepala Biro Umum	Disposisi (Elassa)	<ul style="list-style-type: none"> Mohon dipersiapkan dengan baik. Mohon dipaparkan/dijadwalkan kegiatan/pertemuan dimaknud. Mohon dikordinasikan dan diumumkan dgn baik. Laporan pelambangan dan hasilnya.
---	------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	NOMOR SOP	43/SOP/2500/01/2022
	TGL. PEMBUATAN	18 Oktober 2019
	TGL. REVISI	16 Agustus 2021
	TGL. EFEKTIF	03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BIDANG PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA	NAMA SOP	SOP Narasumber Kunjungan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Peraturan Sekretaris Jenderal MK No. 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekjen MK No. 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan di bidang hukum Memahami struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Memiliki kecakapan untuk melakukan presentasi dan diskusi
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pembimbing Penelitian/Magang		1. Komputer dan kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dapat terlaksana dengan baik, maka diseminasi hak dan kewajiban konstitusional warga negara menjadi terhambat		Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual



Digital Signature
sop230518059202220103091051

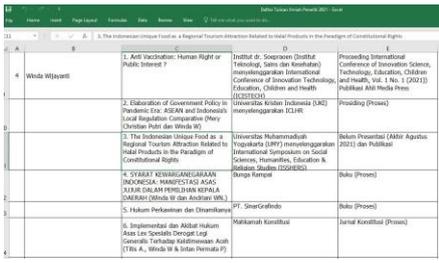
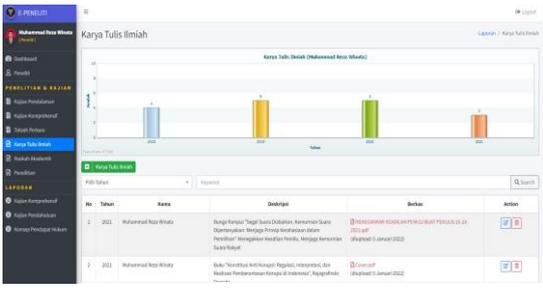
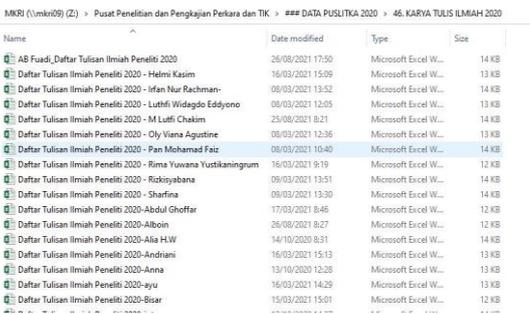
	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Menerima disposisi Sekjen untuk menerima kunjungan	
2.	Memerintahkan penunjukan Peneliti sebagai Narasumber	
3.	Penunjukan Peneliti melalui Surat Tugas	
4.	Mereview Surat Tugas Kunjungan bagi Peneliti	
5.	Menerima, melaksanakan, dan melaporkan tugas sebagai Narasumber Kunjungan	

6. Menerima laporan pelaksanaan tugas sebagai narasumber kunjungan



	NOMOR SOP	45/SOP/2500/01/2022
	TGL. PEMBUATAN	18 Oktober 2019
	TGL. REVISI	16 Agustus 2021
	TGL. EFEKTIF	03 Januari 2022
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BIDANG PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA	NAMA SOP	SOP Pelaporan Karya Tulis Ilmiah
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 3. Persekjen MK No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Persekjen MK No. 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer. 2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik. 3. Memiliki kemampuan di bidang hukum.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	1. Komputer dan kelengkapannya. 2. Alat Tulis. 3. Peraturan Perundang-undangan.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika kegiatan ini tidak terlaksana, maka KTI tidak terdokumentasi dengan baik.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.	



	Kegiatan	Dokumentasi									
1.	Menyusun dan menyampaikan laporan penulisan KTI										
2.	Mereview laporan penyusunan KTI dan meneruskan kepada Kapuslitka	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Penyusun</th> <th>Reviewer</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>1. Anti Viciousitas: Human Right or Public Interest ? 2. Elaboration of Government Policy in Indonesia: Case: ASEAN and Indonesia Local Regulation Comparison (Mey Christian Nider dan Winda W) 3. The Indonesian Udon Food as a Regional Tourism Attraction Related to Rural Products in the Paradigm of Constitutional Rights 4. SIKAP KEBERKORUPSIAN (INDONESIA: MASPETAS ASAS SUKSES DAN PERUBAHAN KEPALA DAERAH (Muda W dan Andriy W)) 5. Hukum Perakatan dan Dinamikanya 6. Implementasi dan Akibat Hukum Rata-Rata Spesifik Terhadap Undang-Undang Tersebut Terhadap Keadilan Masyarakat (Tia A., Winda W & Siska Permuda P)</td> <td>Institut dr. Soegiono Djatiatmahaning, Sari dan Kristianing Inteningsinggarika International Conference of Biosocial, Technology, Education, Children and Health (ICBTCEH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyelenggarakan IC21R. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan International Symposium on Social Science, Humanities, Education & Religion Studies (IS2HERS) PT. Sinar Grafika Mahkamah Konstitusi</td> <td>Proceeding International Conference of Biosocial, Science, Technology, Education, Children and Health, Vol. 1 No. 1 (2021) Publikasi AHI Media Press (INDONESIA) Prosiding (Proses) Buku Prosiding (Akhir Agustus 2021) dan Publikasi Buku (Proses) Buku (Proses) Jurnal Konstitusi (Proses)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Penyusun	Reviewer	Status	4	1. Anti Viciousitas: Human Right or Public Interest ? 2. Elaboration of Government Policy in Indonesia: Case: ASEAN and Indonesia Local Regulation Comparison (Mey Christian Nider dan Winda W) 3. The Indonesian Udon Food as a Regional Tourism Attraction Related to Rural Products in the Paradigm of Constitutional Rights 4. SIKAP KEBERKORUPSIAN (INDONESIA: MASPETAS ASAS SUKSES DAN PERUBAHAN KEPALA DAERAH (Muda W dan Andriy W)) 5. Hukum Perakatan dan Dinamikanya 6. Implementasi dan Akibat Hukum Rata-Rata Spesifik Terhadap Undang-Undang Tersebut Terhadap Keadilan Masyarakat (Tia A., Winda W & Siska Permuda P)	Institut dr. Soegiono Djatiatmahaning, Sari dan Kristianing Inteningsinggarika International Conference of Biosocial, Technology, Education, Children and Health (ICBTCEH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyelenggarakan IC21R. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan International Symposium on Social Science, Humanities, Education & Religion Studies (IS2HERS) PT. Sinar Grafika Mahkamah Konstitusi	Proceeding International Conference of Biosocial, Science, Technology, Education, Children and Health, Vol. 1 No. 1 (2021) Publikasi AHI Media Press (INDONESIA) Prosiding (Proses) Buku Prosiding (Akhir Agustus 2021) dan Publikasi Buku (Proses) Buku (Proses) Jurnal Konstitusi (Proses)
No	Uraian	Penyusun	Reviewer	Status							
4	1. Anti Viciousitas: Human Right or Public Interest ? 2. Elaboration of Government Policy in Indonesia: Case: ASEAN and Indonesia Local Regulation Comparison (Mey Christian Nider dan Winda W) 3. The Indonesian Udon Food as a Regional Tourism Attraction Related to Rural Products in the Paradigm of Constitutional Rights 4. SIKAP KEBERKORUPSIAN (INDONESIA: MASPETAS ASAS SUKSES DAN PERUBAHAN KEPALA DAERAH (Muda W dan Andriy W)) 5. Hukum Perakatan dan Dinamikanya 6. Implementasi dan Akibat Hukum Rata-Rata Spesifik Terhadap Undang-Undang Tersebut Terhadap Keadilan Masyarakat (Tia A., Winda W & Siska Permuda P)	Institut dr. Soegiono Djatiatmahaning, Sari dan Kristianing Inteningsinggarika International Conference of Biosocial, Technology, Education, Children and Health (ICBTCEH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyelenggarakan IC21R. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan International Symposium on Social Science, Humanities, Education & Religion Studies (IS2HERS) PT. Sinar Grafika Mahkamah Konstitusi	Proceeding International Conference of Biosocial, Science, Technology, Education, Children and Health, Vol. 1 No. 1 (2021) Publikasi AHI Media Press (INDONESIA) Prosiding (Proses) Buku Prosiding (Akhir Agustus 2021) dan Publikasi Buku (Proses) Buku (Proses) Jurnal Konstitusi (Proses)								
3.	Menerima laporan penyusunan KTI										
4.	Mencatat dan mengarsipkan laporan penyusunan KTI										
5.	Memberikan catatan format penulisan laporan KTI	